

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM **(005.04.402283)**

LAPORAN KEUANGAN INTERIM

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020



Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1
Muara Enim - Sumatera Selatan 31311
Telp. (0734)7420107, Faks. (0734)7420108
Website: www.pa-muaraenim.go.id
e-mail: pamuaraenim@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN INTERIM PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.04

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Muara Enim - Sumatera Selatan 31311

Telepon (0734)7420107, Faksimili (0734)7420108

Website: www.pa-muaraenim.go.id, e-mail: pamuaraenim@ymail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Muara Enim adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Muara Enim. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Muara Enim, 31 Desember 2020

Sekretaris,

Syam Ratulangi, S.H

NIP. 19640106.200112.1.001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	23
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	25
F. Pengungkapan Penting Lainnya	26
VI. Lampiran	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM, PALI DAN KOTA PRABUMULIH
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108 Muara Enim 31312
Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pamuaraenim@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Muara Enim, 31 Desember 2020

Sekretaris,

Syam Ratulangi, S.H

NIP 19640106.200112.1.001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp125.586.500,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp49.750.000,00 atau mencapai 100.00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp49.750.000,00.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020 .

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar 0,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ (defisit) dari operasi, surplus/ (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus/ (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp125.586.500,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp58.263.586,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp67.322.914,00. Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami surplus-LO sebesar Rp67.322.914,00.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas semester/ tahun pelaporan dibandingkan dengan semester/ tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp6.056.560,00 ditambah surplus-LO sebesar Rp67.322.914,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 (nihil) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp73.379.474,00) terdapat penurunan ekuitas sebesar (Rp6.056.560,00) sehingga ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Laporan Realisasi Anggaran**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019*(dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2020		% terhadap Anggaran	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	125.586.500,00	0,00	134.141.900,00
JUMLAH PENDAPATAN		-	125.586.500,00	0,00	134.141.900,00
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Barang	B.3	49.750.000,00	49.750.000,00	100,00	73.750.000,00
Jumlah Belanja Operasi		49.750.000,00	49.750.000,00	100,00	73.750.000,00
JUMLAH BELANJA		49.750.000,00	49.750.000,00	100,00	73.750.000,00

NERACA

II. Neraca**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM****NERACA**

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET LANCAR			
Persediaan		0,00	6.056.560,00
JUMLAH ASET		0,00	6.056.560,00
EKUITAS			
Ekuitas		0,00	6.056.560,00
JUMLAH EKUITAS		0,00	6.056.560,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		0,00	6.056.560,00

LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM****LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	125.586.500,00	77.441.141,00
JUMLAH PENDAPATAN		125.586.500,00	77.441.141,00
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	8.513.586,00	3.691.141,00
Beban Barang dan Jasa	D.3	4.750.000,00	28.750.000,00
Beban Perjalanan Dinas	D.4	45.000.000,00	45.000.000,00
JUMLAH BEBAN		58.263.586,00	77.441.141,00
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		67.322.914,00	56.700.759,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		0	0
SURPLUS /(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	D.5	0	0
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	-
Jumlah surplus/Defisit dari kegiatan Non operasional		0	190.130,00
surplus/defisit sebelum pos luar biasa		67.322.914	56.890.889
POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/ (DEFISIT) - LO		67.322.914,00	56.890.889,00

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	6.056.560	6.837.571
SURPLUS/ (DEFISIT) - LO	E.2	67.322.914,00	56.890.889,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI		0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	(73.379.474,00)	(57.671.900,00)
KENAIKAN/ (PENURUNAN) EKUITAS		6.056.560	781.011
EKUITAS AKHIR	E.4	0,00	6.056.560

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan Atas Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

*Dasar Hukum Entitas
dan Rencana Strategis*

- a. Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- b. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- f. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja;
- i. Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- j. Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat
- l. Peraturan Menteri Keuangan nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
- m. Peraturan Menteri Keuangan nomor NOMOR 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat

- n. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
- o. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- p. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- q. Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)
- r. Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Muara Enim

Visi Mahkamah Agung adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

- 1. Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Muara Enim sebagai visi dan misinya. Visi Pengadilan Agama Muara Enim adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung”

Misi Pengadilan Agama Muara Enim adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi,
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat,
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien,
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien,
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Agama Muara Enim melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim
3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Meningkatnya akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Pengadilan Agama Muara Enim adalah Pengadilan Tingkat Pertama kelas I B Peningkatan kelas tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, dengan wilayah hukum Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), sedangkan wilayah hukum Prabumulih sudah terpisah dengan berdirinya Pengadilan Agama Prabumulih sesuai Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016. Akan tetapi pada Anggaran Tahun 2018 masih dititipkan pada Pengadilan Agama Muara Enim sebagai Satker induk.

Sifat operasi pengadilan Agama Muara Enim adalah pelayanan publik di bidang penegakan hukum dan keadilan, sedangkan kegiatan pokok Pengadilan Agama

Muara Enim adalah menerima, mengadili, dan memutus perkara yang diterima. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional Pengadilan Agama Muara Enim, adalah:

- a. Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- b. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Muara Enim. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis Akuntansi***A.4. Basis Akuntansi**

Pengadilan Agama Muara Enim menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran***A.5. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Muara Enim dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan Akuntansi***A.6. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang

ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Muara Enim. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja***(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban***(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset***(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar***Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai Perubahan Nilai Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta

rupiah);

- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah

Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam

Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih***(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan Aset
Tetap***(9) Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset

Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. **Pertama**, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. **Kedua**,

keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015. Akan tetapi untuk tahun berikutnya Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas pada tahun berjalan sudah dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan
Rp125.586.500,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp125.586.500,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan. Pendapatan Pengadilan Agama Muara Enim adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak yang terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2020

Uraian	2020		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Pend
Pendapatan Ongkos Perkara	0,00	43.260.000,00	0,00
Pendapatan Kejaksaan & Peradilan Lainnya	0,00	82.326.500,00	0,00
Jumlah	0,00	125.586.500,00	0,00

Secara keseluruhan, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp8.555.400,00 atau 6,37 persen dibandingkan TA 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya lagi Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan pada Pengadilan Agama Muara Enim yang secara signifikan mempengaruhi jumlah penerimaan PNBPNP.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Ongkos Perkara	43.260.000,00	54.640.000,00	(20,83)
Pendapatan Kejaksaan & Peradilan Lainnya	82.326.500,00	79.501.900,00	3,55
JUMLAH	125.586.500,00	134.141.900,00	(6,38)

Realisasi Belanja
Negara Rp
Rp49.750.000,00

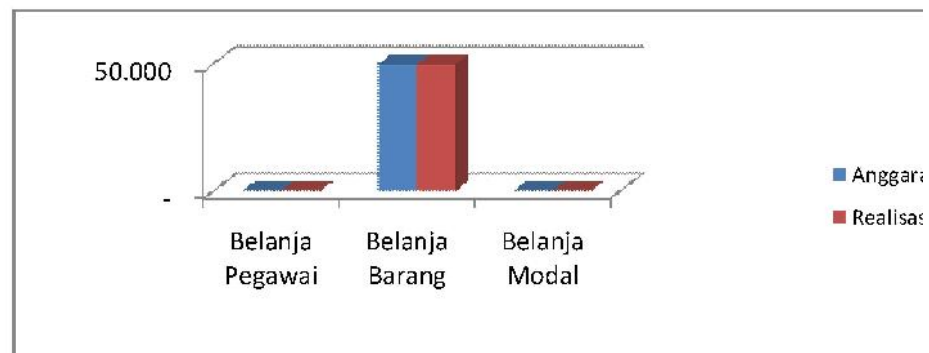
B.2 Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Muara Enim pada TA 2020 adalah sebesar Rp49.750.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran belanja sebesar Rp49.750.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang	49.750.000,00	49.750.000,00	100,00
Jumlah	49.750.000,00	49.750.000,00	100,00

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 24.000.000,00 atau sebesar 32,54 persen dibandingkan realisasi belanja TA 2019 pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penurunan Anggaran Belanja barang di TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	49.750.000,00	73.750.000,00	(32,54)
Jumlah	49.750.000,00	73.750.000,00	(32,54)

Belanja Barang
Rp49.750.000,00

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp49.750.000,00 dan Rp73.750.000,00. Realisasi belanja Barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar 32,54 persen dibandingkan realisasi belanja barang TA 2019 pada periode yang sama.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A 2020	REALISASI T.A 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
Belanja Jasa Konsultan	0,00	24.000.000,00	(100,00)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
Jumlah Bruto	49.750.000,00	73.750.000,00	(32,54)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca Rp0,00

Pengadilan Agama Muara Enim pada laporan keuangan BA 005.04 TA 2020 memiliki akun untuk disajikan ke dalam Neraca per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing berupa nilai persediaan sebesar Rp0,00 dan Rp.6.056.560,00.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONALPendapatan PNB
Rp125.586.500,00**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya - LO sebesar Rp125.586.500,00 dan Rp134.141.900,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2020 dan 2019

URAIAN	T.A. 2020	T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Ongkos Perkara	43.260.000,00	54.640.000,00	(20,83)
Pendapatan Kejaksaan & Peradilan Lainnya	82.326.500,00	79.501.900,00	3,55
Jumlah	125.586.500,00	134.141.900,00	(6,38)

Beban Barang & Jasa
Rp4.750.000,00**D.2 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp4.750.000,00 dan Rp 28.750.000,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan 2019

URAIAN	T.A. 2020	T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Non Operasional Lainnya	4.750.000,00	28.750.000,00	(83,48)
Jumlah	4.750.000,00	28.750.000,00	(83,48)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp45.000.000,00**D.3 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp45.000.000,00 dan Rp45.000.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan (sidang keliling).

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan 2019

URAIAN	T.A. 2020	T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.000.000,00	45.000.000,00	-
Jumlah	45.000.000,00	45.000.000,00	-

Surplus / (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0,00

D.4 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2020 dan 2019

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Surplus/ (Defisit) Kegiatan Non Operasional			
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp6.056.560,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas per 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing adalah Rp6.056.560,00 dan Rp6.837.571,00

Defisit - LO
Rp67.322.914,00

E.2 Surplus/ (Defisit) LO

Jumlah Surplus/ (Defisit) - LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 67.322.914,00 dan Rp56.890.889,00. Surplus - LO merupakan selisih lebih antara surplus/ (defisit) kegiatan operasional, surplus/ (defisit) kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Transaksi Antar
Entitas
(Rp73.379.474,00)

E.3 Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar (Rp73.279.474,00) dan (Rp57.671.900,00). Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara Realisasi Belanja netto (setelah dikurangi pengembalian belanja), Realisasi Pendapatan netto (setelah dikurangi pengembalian pendapatan) dan transaksi lainnya yang terkait dengan entitas lain.

Ekuitas Akhir Rp0,00.

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp6.056.560,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**F.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK**

Pengungkapan

Lainnya

Sampai dengan saat penyusunan Laporan Keuangan TA 2019, Pengadilan Agama Muara Enim belum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), sehingga tidak terdapat temuan maupun tindak lanjut terhadap temuan BPK.

F.2 Rekening Pemerintah

Selama Tahun Anggaran 2020 Pengadilan agama Muara Enim hanya memiliki 1 (satu) rekening yang digunakan untuk pelaksanaan pengelolaan anggaran BA 005.04 yaitu berupa Rekening Giro nomor 112-00.0081818.2 a.n. BPg 144 PA Muara Enim (04) di Bank Mandiri Cabang Muara Enim dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00 (nihil).

F.3 Pengelolaan Dana Pihak Ke-3

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 03 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, bahwa seluruh biaya proses dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan Mahkamah Agung RI (*off balance sheet*). Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp66.382.500,00 Sedangkan Saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp69,120.000,00 . Rincian biaya proses penyelesaian perkara dimaksud, sebagai berikut:

Rincian Biaya Proses Penyelesaian Perkara TA 2020

Biaya Perkara	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Lain-lain	Jumlah
Rp 60.981.500,00	Rp 5.401.000,00	-	-	66.382.500,00

Penjelasan mengenai biaya proses penyelesaian diatas antara lain:

a. Biaya Perkara

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara yaitu pihak yang mengajukan gugatan/ permohonan sebagai uang muka (panjar) biaya penanganan/ penyelesaian perkara mereka di Pengadilan Agama. Pada

dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena Penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar, maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan. Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada pihak sendiri diatur dalam HIR (*Het Herzien Inlands Reglemen, Staatsblad* tahun 1941 no 44) dan dalam R.Bg (*Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera* *Staatsblad* 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2012, tanggal 10 April 2012. Panjar Biaya Perkara ini terdiri dari : Biaya panggilan, Biaya sita, Biaya untuk mendukung proses penanganan perkara seperti penggandaan dokumen, penjiilidan, dll serta Hak-hak Kepaniteraan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetor ke Kas Negara.

b. Biaya Eksekusi

Merupakan uang muka/ panjar untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila pihak yang “kalah” tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan Pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

c. Konsinyasi

Uang konsinyasi adalah dana yang dititipkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar, karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran tidak mau menerima

d. Titipan dari Kepaniteraan Pidana

Uang ini terdiri dari ;

- Uang jaminan penangguhan penahanan
- Uang yang menjadi barang bukti dalam suatu perkara pidana

e. Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI)

LAMPIRAN



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-148438/WPB.06/KP.144/2020

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM (402283) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara LAHAT , yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2020.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	49,750,000	49,750,000	0
2	Belanja	49,750,000	49,750,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	125,586,500	125,586,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Kharly Oktaperdana
NIP.198910112010121002



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran / Sekretaris
Pengadilan Agama Muara Enim

Syam Ratulangi, S.H
NIP.196401062001121001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM (402283)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 49,750,000

SAI/SA-BUN : 49,750,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 49,750,000

SAI/SA-BUN : 49,750,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 125,586,500

SAI/SA-BUN : 125,586,500

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Kharly Oktaperdana
NIP.198910112010121002



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran / Sekretaris
Pengadilan Agama Muara Enim

Syam Ratulangi, S.H
NIP.196401062001121001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005	MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
KDUAPPAW : 005041100KD	BA(005) ES1(04) SUMATERA SELATAN
KODE SATKER : 402283	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Tgl. Cetak 28/01/2021 3:40 AM
lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	0	6,056,560	(6,056,560)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	6,056,560	(6,056,560)	(100.00)
JUMLAH ASET	0	6,056,560	(6,056,560)	(100.00)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	0	6,056,560	(6,056,560)	(100.00)
JUMLAH EKUITAS	0	6,056,560	(6,056,560)	(100.00)
JUMLAH EKUITAS	0	6,056,560	(6,056,560)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	6,056,560	(6,056,560)	(100.00)

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005	MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : 1100	SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : 402283	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Tgl. Cetak 28/01/2021 3:52 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	49,750,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	125,586,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	2,457,026
0.0	391111	Ekuitas	0	6,056,560
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	43,260,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	82,326,500
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	4,750,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	45,000,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	8,513,586	0
JUMLAH			183,850,086	183,850,086

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN	: 005	MAHKAMAH AGUNG	Kode Lap : LO.SAT
ESELON I	: 04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	Tanggal : 28/01/21 3:41 AM
WILAYAH/PROVINSI	: 1100	SUMATERA SELATAN	Halaman : 1
SATUAN KERJA	: 402283	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	Prg ID : lap_lo_satker --
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	125,586,500	134,141,900	(8,555,400)	(6.378)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	125,586,500	134,141,900	(8,555,400)	(6.378)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	125,586,500	134,141,900	(8,555,400)	(6.378)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	8,513,586	3,691,141	4,822,445	130.649
Beban Barang dan Jasa	4,750,000	28,750,000	(24,000,000)	(83.478)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	45,000,000	45,000,000	0	0
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN	: 005	MAHKAMAH AGUNG	Kode Lap : LO.SAT
ESELON I	: 04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	Tanggal : 28/01/21 3:41 AM
WILAYAH/PROVINSI	: 1100	SUMATERA SELATAN	Halaman : 2
SATUAN KERJA	: 402283	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	Prg ID : lap_lo_satker --
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	58,263,586	77,441,141	(19,177,555)	(24.764)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	67,322,914	56,700,759	10,622,155	18.734
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	190,130	(190,130)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	190,130	(190,130)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	190,130	(190,130)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	67,322,914	56,890,889	10,432,025	18.337
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	67,322,914	56,890,889	10,432,025	18.337

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 402283 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 28/01/21 3:41 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --rekon17

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	6,056,560	6,837,571	(781,011)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	67,322,914	56,890,889	10,432,025	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(73,379,474)	(57,671,900)	(15,707,574)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(6,056,560)	(781,011)	(5,275,549)	-
EKUITAS AKHIR	0	6,056,560	(6,056,560)	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
 ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
 WILAYAH/PROVINSI : SUMATERA SELATAN 1100
 SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM 402283

Kode Lap : LRA.F.S
 Tanggal : 28/01/21 3:40 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --

NO	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	125,586,500	(125,586,500)	0	37,000,000	134,141,900	(97,141,900)	363
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	125,586,500	(125,586,500)	0	37,000,000	134,141,900	(97,141,900)	368
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	49,750,000	49,750,000	0	100	73,750,000	73,750,000	0	100
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	49,750,000	49,750,000	0	100	73,750,000	73,750,000	0	100
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : 1100 BA(005) ES1(04) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : 402283 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 28/01/21 3:41 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun --
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,750,000	4,750,000	4,750,000	0	4,750,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4,750,000	4,750,000	4,750,000	0	4,750,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	49,750,000	49,750,000	49,750,000	0	49,750,000	100	0
	JUMLAH BELANJA	49,750,000	49,750,000	49,750,000	0	49,750,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SATUAN KERJA

: 005
: 402283

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 28/01/21 11:29
Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
52	BELANJA BARANG							
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,750,000	4,750,000	4,750,000	0	4,750,000	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	49,750,000	49,750,000	49,750,000	0	49,750,000	100	0
	JUMLAH RUPIAH MURNI	49,750,000	49,750,000	49,750,000	0	49,750,000	100	0
	TOTAL	49,750,000	49,750,000	49,750,000	0	49,750,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : 402283 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 28/01/21 3:41 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	43,260,000	0	43,260,000	0
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	82,326,500	0	82,326,500	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	0	125,586,500	0	125,586,500	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	125,586,500	0	125,586,500	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	125,586,500	0	125,586,500	

**RINCIAN NILAI KAS PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
PER 31 DESEMBER 2020**

BA : 005 Mahkamah Agung RI

ESELON I : 004 Badan Peradilan Agama

UAPPA : 402283 Pengadilan Agama Muara Enim

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

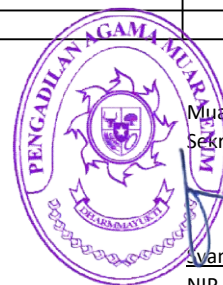
No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Saldo Per 31 Desember 2020		Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2019		Keterangan
			Jumlah	Tunai/Nomor Rekening		Jumlah	Tunai/Nomor Rekening	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	402283	Pengadilan Agama Muara Enim	NIHIL	112-00.0081818.2	-	NIHIL	112-00.0081818.2	-

KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Saldo Per 31 Desember 2020		Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2019		Keterangan
			Jumlah	Tunai/Nomor Rekening		Jumlah	Tunai/Nomor Rekening	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	402283	Pengadilan Agama Muara Enim	NIHIL	-		NIHIL	-	

KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Saldo Per 31 Desember 2020		Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2019		Keterangan
			Jumlah	Tunai/Nomor Rekening		Jumlah	Tunai/Nomor Rekening	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	402283	Pengadilan Agama Muara Enim	NIHIL	-		NIHIL	-	



Muara Enim, 31 Desember 2020
Sekretaris

Swam Ratulangi, S.H
NIP. 19640106.200112.1.001

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
PERIODE 31 DESEMBER 2020

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL IJIN REKENING	STATUS TNP/BELUM TNP	SALDO REKENING KORAN
1	Pengadilan Agama Muara Enim	005	01	GIRO	0128.01.000018.30.6	BPg 144 PA MUARA ENIM (01)	BRI Cabang Muara Enim	S-263/WPB.07/KP.0530/2015	25/03/2015	TNP	NIHIL
2	Pengadilan Agama Muara Enim	005	04	GIRO	112-00.0081818.2	BPg 144 PA MUARA ENIM (04)	Bank Mandiri Cabang Muara Enim	S-264/WPB.07/KP.0530/2015	25/03/2015	TNP	NIHIL



Muara Enim, 31 Desember 2020
Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim

Syam Ratulangi, S.H
NIP. 19640106.200112.1.001

LAPORAN TRANSAKSI



Kepada Yth.

BPg 144 PA MUARA ENI

JALAN LINTAS MUARA ENIM

DS/KEL. LAINNYA

MUARA ENIM KAB. MUARAENIM

MUARA ENIM KAB.

Tanggal Laporan : 30/12/20

Periode Transaksi : 01/12/20 - 30/12/20

Halaman : 1

No. Rekening : 012801000018306

Unit Kerja : KC Muara Enim

No. Kartu :

Alamat Unit Kerja : Jl. Sudirman No 88

Nama Produk : Giro Tres.NotP

Muara Enim

Valuta : IDR

Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Chq No	Debet	Kredit	Saldo	Teller
04/12/20 09:15:25	SPAN: :201441304009000000001		0.00	373,000.00K	373,000.00K	SPN410
08/12/20 09:26:11	SPAN: :201441304009200000001		0.00	51,349,328.00K	51,722,328.00K	SPN410
08/12/20 14:52:33	CA Cash Withdrawal T:0128053:NEWBRUNETSWEB	1021983	51,722,328.000	0.00	0.00	0128053
08/12/20 15:07:38	Salary crediting BY PINDAH TENAGA TEKNIK		0.00	5,040,000.00K	5,040,000.00K	
08/12/20 15:12:06	Salary crediting BY MUTASI MA		0.00	86,165,000.00K	91,205,000.00K	
10/12/20 10:37:02	CA Cash Withdrawal T:0128053:NEWBRUNETSWEB	1021984	91,205,000.000	0.00	0.00	0128053
18/12/20 13:24:46	Salary crediting TRANSPORT HAKIM DESERIBE		0.00	4,788,000.00K	4,788,000.00K	
21/12/20 11:53:17	CA Cash Withdrawal T:0128053:NEWBRUNETSWEB	1021985	4,788,000.000	0.00	0.00	0128051

SALDO AWAL	TOTAL MUTASI DEBIT	TOTAL MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR
0.00	147,715,328.000	147,715,328.00K	0.00
Terbilang			
NOL RUPIAH			

Biaya material telah dibayar lunas

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank.
- Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI

Kepada Yth / To
11214
BPG 144 PA MUARA ENIM (04)
Jln.Mayor Tjik Agus Kienas SH
No.1 Kepur
Muaraenim
Muaraenim Wil.Kec. MUARAENIM 31351

No. Rekening/Account Number : 112-00-0081818-2
Nama Produk/Product Name : Giro Trsry Not Pol
Valuta/Currency : Indonesia Rupiah
Periode/Period : 1/12/20 s/d 30/12/20
Cabang/Branch : KOP Muara Enim
No. Kartu/Card Number :
No. NPWP/NPWP Number : 000019083313000

HALAMAN: 1

1. Tgl. Val te Val.Date	Rincian Transaksi / No. Referensi Description / Reference No.	Debet / Kredit Debet / Credit	Saldo Balance
	Saldo Pemindahan		.00
/12 03/12	MDM InhouseTrf - SPAN 201441303001174000001	4,750,000.00	4,750,000.00
/12 03/12	Tarik Tunai - OK 615457-ARI CAHYADI ID 615457	4,750,000.00 D	.00
			.00
	Mutasi Kredit :		4,750,000.00 1
	Mutasi Debet :		4,750,000.00 1
	Saldo Akhir :		.00

* END OF REPORT *

Status Biaya Statement Nasabah :

000

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
PERIODE 31 DESEMBER 2020

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL IJIN REKENING	STATUS TNP/BELUM TNP	SALDO REKENING KORAN
				N	I	H	I	L			

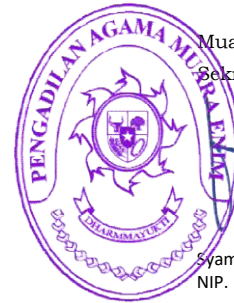


Muara Enim, 31 Desember 2020
Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim

Syam Ratulangi, S.H
NIP. 19640106.200112.1.001

DAFTAR REKENING PERKARA DAN REKENING PERKARA LAINNYA SATUAN KERJA PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
PERIODE 31 DESEMBER 2020

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL IJIN REKENING	STATUS TNP/BELUM TNP	SALDO REKENING KORAN
1	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	005	4	GIRO	0776268807	RPL 144 PA MUARA ENIM UTK PDT BIAYA PERKARA	BNI Syari'ah Cabang Muara Enim	S-1091/WPB.07/KP.0304/2018	29 November 2018	TNP	56.777.381,00



Muara Enim, 31 Desember 2020
 Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim

Syam Ratulangi, S.H
 NIP. 19640106.200112.1.001

Transaction Inquiry

Account	:	776268807/RPL 144 PA MUARA ENIM UTK PDT BIAYA PERKARA (IDR)					
Period	:	01-Dec-2020 - 28-Dec-2020					
Beginning Balance	:	118,244,381.00					
Total Debit	:	85,000,000.00					
Total Credit	:	23,533,000.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
1	01/12/2020 15.53.42	SYARIAH MIKRO BATURAJA	388873	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI PANJAR AN M TAMRIN	746,000.00	C	118,990,381.00
2	01/12/2020 15.54.36	SYARIAH MIKRO BATURAJA	411842	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI PANAJR AN MALESI NYATA	671,000.00	C	119,661,381.00
3	01/12/2020 15.55.32	SYARIAH MIKRO BATURAJA	435711	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI PANJAR AN SUCI AGUSTINI	1,196,000.00	C	120,857,381.00
4	01/12/2020 15.56.13	SYARIAH MIKRO BATURAJA	452630	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI PANJAR AN SULASTRI	1,896,000.00	C	122,753,381.00
5	01/12/2020 15.57.08	SYARIAH MIKRO BATURAJA	475784	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI PANJAR AN MUSTIKA	1,721,000.00	C	124,474,381.00
6	01/12/2020 16.00.09	SYARIAH MIKRO BATURAJA	562122	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI PANJAR AN HAIRUL	1,646,000.00	C	126,120,381.00
7	01/12/2020 16.00.57	SYARIAH MIKRO BATURAJA	589551	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI PANJAR AN SUKARNI	746,000.00	C	126,866,381.00
8	01/12/2020 16.02.01	SYARIAH MIKRO BATURAJA	621376	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI PANJAR AN TRI YANTONI	1,646,000.00	C	128,512,381.00
9	02/12/2020 15.46.52	SYARIAH MIKRO BATURAJA	044599	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI PANJAR AN NURI YANI S.PD	1,396,000.00	C	129,908,381.00
10	02/12/2020 15.47.52	SYARIAH MIKRO BATURAJA	071722	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI PANJAR AN HARNINI	596,000.00	C	130,504,381.00
11	02/12/2020 15.49.03	SYARIAH MIKRO BATURAJA	099493	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI PANJAR AN SADI BIN MUSTAMAR	1,146,000.00	C	131,650,381.00
12	02/12/2020 15.50.01	SYARIAH MIKRO BATURAJA	120587	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI PANJAR AN HASMI FITRIANI	1,396,000.00	C	133,046,381.00
13	03/12/2020 09.15.06	SYARIAH MIKRO BATURAJA	053537	TARIK CHQ KB110294 PENCAIRAN CEK PA KB110294// DIANA CAESARIANTI	60,000,000.00	D	73,046,381.00
14	03/12/2020 15.50.25	SYARIAH MIKRO BATURAJA	306734	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI PANJAR AN ERWIN GUNAWAN	2,340,000.00	C	75,386,381.00
15	03/12/2020 15.51.43	SYARIAH MIKRO BATURAJA	334021	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI TAMBAHAN PANJAR AN HERLANSYAH	29,000.00	C	75,415,381.00
16	03/12/2020 15.52.38	SYARIAH MIKRO BATURAJA	353670	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI PANJAR AN APRIANA	896,000.00	C	76,311,381.00
17	03/12/2020 15.53.44	SYARIAH MIKRO BATURAJA	377912	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI PANJAR AN DARUL	1,146,000.00	C	77,457,381.00
18	03/12/2020 15.54.48	SYARIAH MIKRO BATURAJA	401584	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI PANJAR AN ADE STARIO	29,000.00	C	77,486,381.00
19	04/12/2020 14.10.27	SYARIAH MIKRO BATURAJA	110697	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI PANJAR AN NETI S	646,000.00	C	78,132,381.00
20	10/12/2020 15.52.40	SYARIAH MIKRO BATURAJA	796509	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI PANJAR AN WEDY ASTUTI	446,000.00	C	78,578,381.00
21	10/12/2020 15.53.35	SYARIAH MIKRO BATURAJA	026295	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI PANJAR AN GUNTUR	346,000.00	C	78,924,381.00
22	15/12/2020 16.02.09	SYARIAH MIKRO BATURAJA	525345	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI TAMBAHN PANJAR AN UPIK	9,000.00	C	78,933,381.00
23	16/12/2020 15.48.06	SYARIAH MIKRO BATURAJA	398221	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI PANJAR BANDINC AN RANI PURNAMASARI	2,615,000.00	C	81,548,381.00
24	22/12/2020 08.55.42	SYARIAH MIKRO BATURAJA	590922	TARIK CHQ KB110295 PENCAIRAN CEK KB 110295//DIANA CAESARIANTI	25,000,000.00	D	56,548,381.00
25	23/12/2020 14.41.31	SYARIAH MIKRO BATURAJA	128124	SETOR TUNAI SURATMAN HARDI TAMBAHAN PANJAR AN EKO HANDOYO	229,000.00	C	56,777,381.00



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM DAN PALI
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108 Muara Enim 31312
Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pamuaraenim@gmail.com

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Laporan Keuangan Berbasis Akrua Tahun 2020 yang berkualitas dan untuk mempertahankan opini WTP, kami bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syam Ratulangi, S.H
NIP : 196401062001121001
Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Imron Rusadi, S.H
NIP : 196802051989021001
Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a
Jabatan : Plt. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palembang

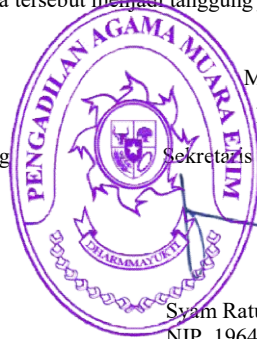
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan telah bersungguh-sungguh menyusun Laporan Keuangan Tahun 2020 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua dan telah diverifikasi secara berjenjang melalui pengawasan melekat (berjalannya Sistem Pengendalian Intern/SPI). Jika terdapat perubahan dikemudian hari, maka pihak pertama akan memperbaiki dan menyerahkan kembali kepada Pihak Kedua.

Apabila dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku, pihak pertama bersedia mendapatkan tindakan penegakan disiplin sesuai ketentuan hukum yang berlaku dari pihak kedua. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Kedua,
Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Imron Rusadi, S.H
NIP. 196802051989021001



Muara Enim, 30 Desember 2020
Pihak Pertama,
Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim

Syam Ratulangi, S.H
NIP. 196401062001121001

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H
NIP. 195809041984031003



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM DAN PALI
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108 Muara Enim 31312
Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pamuaraenim@gmail.com

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Laporan Keuangan Berbasis Akrua Tahun 2020 yang berkualitas dan untuk mempertahankan opini WTP, kami bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmi Oktaria, S.H.I
NIP : 198010072011012005
Pangkat/Golongan : Penata / III.c
Jabatan : Kasubag Umum Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Syam Ratulangi, S.H
NIP : 196401062001121001
Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan telah bersungguh-sungguh menyusun Laporan Keuangan Tahun 2020 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua dan telah diverifikasi secara berjenjang melalui pengawasan melekat (berjalannya Sistem Pengendalian Intern/SPI). Jika terdapat perubahan dikemudian hari, maka pihak pertama akan memperbaiki dan menyerahkan kembali kepada Pihak Kedua.

Apabila dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku, pihak pertama bersedia mendapatkan tindakan penegakan disiplin sesuai ketentuan hukum yang berlaku dari pihak kedua.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua.


Pihak Kedua,
Sekretaris

Syam Ratulangi, S.H
NIP. 196401062001121001

Muara Enim, 30 Desember 2020

Pihak Pertama,
Kasubag. Umum Keuangan

Rahmi Oktaria, S.H.I
NIP. 198010072011012005

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

Drs. Husaini, S.H., M.H
NIP 196812191994031001



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM DAN PALI

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108 Muara Enim 31312

Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pamuaraenim@gmail.com

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Laporan Keuangan Berbasis Akrua Tahun 2020 yang berkualitas dan untuk mempertahankan opini WTP, kami bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmi Oktaria, S.H.I
NIP : 198010072011012005
Pangkat/Golongan : Penata /III.c
Jabatan : Operator SAIBA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Rahmi Oktaria, S.H.I
NIP : 198010072011012005
Pangkat/Golongan : Penata / III.c
Jabatan : Kasubag Umum Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan telah bersungguh-sungguh menyusun Laporan Keuangan Tahun 2020 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua dan telah diverifikasi secara berjenjang melalui pengawasan melekat (berjalannya Sistem Pengendalian Intern/SPI). Jika terdapat perubahan dikemudian hari, maka pihak pertama akan memperbaiki dan menyerahkan kembali kepada Pihak Kedua.

Apabila dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku, pihak pertama bersedia mendapatkan tindakan penegakan disiplin sesuai ketentuan hukum yang berlaku dari pihak kedua.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua.



Pihak Kedua,
Kasubag Umum Keuangan

Rahmi Oktaria, S.H.I
NIP. 198010072011012005

Muara Enim, 30 Desember 2020

Pihak Pertama,
Operator

Rahmi Oktaria, S.H.I
NIP. 198010072011012005



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM DAN PALI
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108 Muara Enim 31312
Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pamuaraenim@gmail.com

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI Tahun 2020 yang berkualitas dan untuk mempertahankan opini WTP, kami bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ary Puspita Yudha, S.T
NIP : 198709142015032002
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I /III.b
Jabatan : Operator SIMAK BMN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Rahmi Oktaria, S.H.I
NIP : 198010072011012005
Pangkat/Golongan : Penata / III.c
Jabatan : Kasubag Umum Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan telah bersungguh-sungguh menyusun Laporan Keuangan Tahun 2020 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI dan telah diverifikasi secara berjenjang melalui pengawasan melekat (berjalannya Sistem Pengendalian Intern/SPI). Jika terdapat perubahan dikemudian hari, maka pihak pertama akan memperbaiki dan menyerahkan kembali kepada Pihak Kedua.

Apabila dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku, pihak pertama bersedia mendapatkan tindakan penegakan disiplin sesuai ketentuan hukum yang berlaku dari pihak kedua.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua.



Pihak Kedua,
Kasubag Umum Keuangan

Rahmi Oktaria, S.H.I
NIP. 198010072011012005

Muara Enim, 30 Desember 2020

Pihak Pertama,
Operator

Ary Puspita Yudha, S.T
NIP. 198709142015032002

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UAKPA / SATKER (NON BLU)
PERIODE DESEMBER 2020

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 ESELON I/ UAPPA-E1 : 04 BADAN PERADILAN AGAMA
 UAPPA-W : 11 00 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA/ UAKPA : 402283 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Tidak	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. LRA, Neraca, LO dan LPE face	✓		Ada
2. Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrua	✓		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	✓		Ada
4.			Ada
5.			Ada
<i>UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA dapat menambahkan Laporan yang harus disampaikan/dilampirkan dalam LK UAKPA/Satker sesuai dengan kebutuhan UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA dalam penyajian dan pengungkapan LKKL.</i>			
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2019 ?	✓		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga seharusnya sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
PENGUNAAN APLIKASI			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah seluruh Aplikasi (Persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA) telah menggunakan versi paling akhir ?	✓		Ya
<i>Apabila tidak menggunakan aplikasi versi terakhir dimungkinkan terdapat perbedaan posting rule yang berdampak pada penyajian laporan keuangan.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Pada Laporan Neraca Face: Apakah Total Aset sama dengan Total Kewajiban ditambah Total Ekuitas ? (Aset = Kewajiban + Ekuitas)	✓		Ya
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama

NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? <i>Cek juga di e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Akun Non Ref"</i>		√	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? <i>Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang"</i>		√	Tidak
TELAAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? <i>(Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)</i>		√	Tidak
2. Adakah akun "Belum Diregister" ? <i>Dalam LK Tahunan tidak boleh ada akun "Belum diregister"</i>		√	Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. <i>Adakah saldo 218211 (hibah langsung yang belum disahkan) pada awal tahun ? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)</i>		√	Ya/Tidak
2. Apakah Saldo Akun 218211 akhir tahun berkurang dibanding awal tahun?			Ya/Tidak
3. Jika berkurang, apakah ada pengesahan Hibah Langsung TAYL (MPHL-BJS TAYL) ?			Ya
<i>Akun 218211 hanya dapat berkurang jika ada pengesahan Hibah Langsung TAYL.</i>			
4. Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 ?			Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
2. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		√	Tidak
Transfer Masuk (TM) 313221 dan Transfer Keluar (TK) 313211			
1. Nilai selisih TK/TM (excel e-Rekon&LK) secara Absolut	Rp.		
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>			
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	Rp.		

AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)			
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) kecuali BA.015.04 ?		√	Tidak
Akun Pendapatan Bukan Pajak (42xxxx)			
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 423xxx (Akun 423xxx tidak boleh ada)		√	Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		√	Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		√	Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		√	Tidak
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya? (misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan)		√	Tidak
2. Adakah akun 425719 Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? (seharusnya 425764 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro))		√	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)			
1. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)		√	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		√	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)			
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		√	Tidak
Akun BLU yang tidak boleh ada			
1. Adakah akun dengan frasa "BLU"		√	Tidak
2. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
4. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Telaah Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan			
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311	-		
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311	-		
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		√	Tidak
Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar.			

LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3. Adakah beban bunga		√	Tidak
4. Adakah beban subsidi		√	Tidak
5. Adakah beban hibah		√	Tidak
6. Adakah beban transfer		√	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		√	Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya		√	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	√		Ya
Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO		√	Ya
Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo Pos "penyesuaian Nilai Aset" ?		√	Tidak
2. Apakah Nilai "Selisih Revaluasi Aset Tetap" sama dengan Laporan Hasil IP (LHIP) dari DJKN?	√		Ya
3. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Sama
Apabila perhitungan no.3 menghasilkan "tidak sama" berarti melakukan jurnal menggunakan akun 391111 (perbaiki)			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cetak seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah telah dibuat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	√		Ya
NERACA			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN (Kec. Kemlu)	√		Ya
2. Apakah ada akun "Belum Diregister" ?		√	Tidak
3. Dari kolom perbandingan antara Tahunan 2018 dengan Audited 2017, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2017, Apakah demikian?	√		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

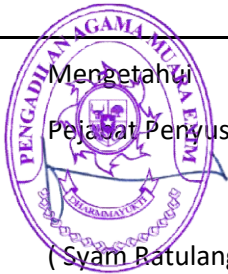
Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sama dengan LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	√		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	√		Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- Pendapatan Penyesuaian Persediaan (akun 491511 di Neraca Percobaan)	√		Ada/Tidak
- Beban Penyesuaian Persediaan (akun 593311 di Neraca Percobaan)	√		Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x) ?		√	Ada/Tidak
- Adakah pendapatan sewa diterima Dimuka (akun 219211) pada Neraca ?		√	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas (522141) ?		√	Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		√	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?		√	Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca		√	Ada

KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal?		√	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Tahunan 2020?		√	Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?		√	Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (<i>Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus</i>)		√	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja " <i>tidak ada</i> " pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto		√	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto		√	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU		√	Tidak
6. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
7. Adakah TDK Kas Hibah		√	Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			
Pengecekan TDK Hibah dengan SPAN	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah TDK Hibah Langsung dengan SPAN? <i>Data selain dilihat dari SPAN, juga dapat diperoleh dari Dit. APK, DJPB.</i>		√	Tidak
PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing KL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan ?	√		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	√		Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		√	Tidak
4. Apakah PNPB telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	√		Ya
5. Adakan PNPB digunakan langsung?		√	Tidak
6. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	√		Ya
7.			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	√		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	√		
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	√		
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	√		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	√		Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
6. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	√		Ya
7. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	√		Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"



Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

(Syam Ratulangi, S.H)

NIP. 19640106.200112.1.001

Muara Enim, 31 Desember 2020

Penelaah,

(Rahmi Oktaria, S.H.I)

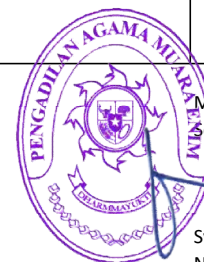
NIP .19801007.201101.2.005

RENCANA TINDAK LANJUT KANTOR PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
TERHADAP TEMUAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
PER 31 DESEMBER 2020

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			RENCANA TINDAK	JADWAL PENYELESAIAN
		I	II	III		
1	2	3	4	5	6	7
		~ N I H I L ~				

Catatan :

1. Klasifikasi I : Diisi dengan tanda silang (X), apabila pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan
Klasifikasi II : Diisi dengan tanda silang (X), apabila pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam tahun anggaran berikutnya
Klasifikasi III : Diisi dengan tanda silang (X), apabila pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya
2. Format ini berlaku bagi Satker/ Korwil yang sudah diperiksa oleh Tim Pemeriksa BPK.



Muara Enim, 31 Desember 2020
Sekretaris

Syam Ratulangi, S.H
NIP. 19640106.200112.1.001

MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT KANTOR PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
TERHADAP TEMUAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
PER 31 DESEMBER 2020

[illegible]

Catatan :

1. Klasifikasi I : Diisi dengan tanda silang (X), apabila pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan
Klasifikasi II : Diisi dengan tanda silang (X), apabila pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam tahun anggaran berikutnya
Klasifikasi III : Diisi dengan tanda silang (X), apabila pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya
2. Format ini berlaku bagi Satker/ Korwil yang sudah diperiksa oleh Tim Pemeriksa BPK.



Muara Enim, 31 Desember 2020

Sekretaris

Syarn Ratulangi, S.H

NIP. 19640106.200112.1.001

**INFORMASI HIBAH
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
PER 31 DESEMBER 2020**

NO	ASAL HIBAH	JENIS HIBAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	~ N I H I L ~			



Muara Enim, 31 Desember 2020

Syam Ratulangi, S.H
NIP. 19640106.200112.1.001



BERITA ACARA PEMERIKSAAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN
Nomor : W6-A5/1558/KU.01/XII/2020

Nama Satker : Pengadilan Agama Muara Enim
Kode Satker : 402283
UAPPB-W : 11.00
UAPPB-E1 : 005.04

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun Dua Ribu dua puluh bertempat di Kantor Pengadilan Agama Muara Enim, kami yang bertandatangan di bawah ini, Panitia *opname fisik* Persediaan:

1. Nama : Rahmi Oktaria, S.H.I.
NIP : 198010072011012005
Jabatan : Kasub Bag Umum dan Keuangan
2. Nama : Ari Puspita Yudha, S.T
NIP : 198709142015032002
Jabatan : Operator Persediaan

Menyatakan bahwa telah melakukan *opname fisik* persediaan Semester II Tahun 2020 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2020 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (*Opname Fisik*)

1. Rahmi Oktaria, S.H.I.

2. Ary Puspita Yudha, S.T



Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Agama Muara Enim

Syam Ratulangi, S.H
NIP. 19640106.200112.1.001

HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : Pengadilan Agama Muara Enim
 Kode Satker : 402283
 UAPPB-W : 11.00
 UAPPB-E1 : 005.04

No	Nama Barang	Kode Barang	Kuantitas Barang		Selisih	Kondisi		
			Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang	Rusak
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		N	I	H	I	L		

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan
 (Opname Fisik)

1. Rahmi Oktaria, S.H.I

()

2. Ary Puspita Yudha, S.T

()



Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Barang
 Pengadilan Agama Muara Enim


Syam Ratulangi, S.H
 NIP. 19640106.200112.1.001



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Telp. 0734-7420107 Fax. 0734-7420108

Muara Enim - Sumatera Selatan 31311

www.pa-muaraenim.go.id e-mail : pa.muaraenim@gmail.com

BERITA ACARA AKURASI DATA

BAGIAN KEUANGAN DAN BAGIAN UMUM

BAGIAN ANGGARAN 005.04 BADAN PERADILAN AGAMA

SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh telah dilakukan Akurasi Data antara Bagian Keuangan dan Bagian Umum satuan kerja Pengadilan Agama Muara Enim, dengan per akun neraca untuk periode per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

No.	Uraian	Neraca SIMAK-BMN	Neraca SAIBA	Selisih
A.	Aset Lancar			
1.	Persediaan	0,00	0,00	0,00
B.	Aset Tetap			
2.	Tanah	0,00	0,00	0,00
3.	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
4.	Ak. Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
5.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
6.	Ak. Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
7.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
8.	Ak. Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
9.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
10.	Ak. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
11.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
C.	Aset Lainnya			
12.	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
13.	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00
14.	Ak. Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Total		0,00	0,00	0,00

Operator SAIBA

Rahmi Oktaria, S.H.I
NIP.198010072011012005

Operator SIMAK BMN

Ary Puspita Yudha, S.T.
NIP. 198312192012121002



Mengetahui,
Sekretaris

Syam Ratulangi, S.H
NIP.196401062001121001

Menyetujui
Kasub Bag Umum dan Keuangan

Rahmi Oktaria, S.H.I
NIP. 198010072011012005



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Telp. 0734-7420107 Fax. 0734-7420108

Muara Enim - Sumatera Selatan 31311

www.pa-muaraenim.go.id e-mail : pa.muaraenim@gmail.com

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA BAGIAN ANGGARAN 005.04 BADAN PERADILAN AGAMA PADA SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM NOMOR : W6-A5/ 1560/KU.01/XII/2020

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh, bertempat di Pengadilan Agama Muara Enim, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Ary Puspita Yudha, S.T.
NIP : 198312192012121002
Jabatan : Operator SIMAK BMN
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Unit Akuntansi Barang pada Pengadilan Agama Muara Enim, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : Rahmi Oktaria, S.H.I.
NIP : 198010072011012005
Jabatan : Operator SAIBA
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Unit Akuntansi Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Agama Muara Enim dengan cara membandingkan data BMN Kuasa Pengguna (KP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester II Tahun Anggaran 2020 dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca Belanja Modal	Nilai BMN Periode 31 Desember 2020		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
1	2	3	4	(5) = (3) + (4)
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan	0,00	0,00	0,00
B	ASET TETAP			
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
C	ASET LAINNYA			
1	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
2	Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	0,00	0,00	0,00
E	Ekstrakomptabel	0,00	0,00	0,00
F	TOTAL (D+E)	0,00	0,00	0,00

Rincian terlampir



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Telp. 0734-7420107 Fax. 0734-7420108

Muara Enim - Sumatera Selatan 31311

www.pa-muaraenim.go.id e-mail : pa.muaraenim@gmail.com

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Semester II Tahun Anggaran 2020, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator SAIBA

Rahmi Oktaria, S.H.I
NIP.198010072011012005

Operator SIMAK BMN

Ary Puspita Yudha
NIP. 198709142015032002



Mengetahui,
Sekretaris

Syam Ratulangi, S.H

NIP. 196401062001121001

**DATA KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
PER 31 DESEMBER 2020**

No. Urut	Nama Satker/Pengadilan	Saldo Akhir per 31 Desember 2020				Jumlah	Keterangan
		Biaya Perkara	Biaya Eksekusi	Konsinyasi	Lain-lain		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengadilan Agama Muara Enim	Rp 60.981.500,00	Rp 5.401.000,00	Rp -	Rp -	Rp 66.382.500,00	



Muara Enim, 31 Desember 2020
Sekretaris

Syam Ratulangi, S.H
NIP. 19640106.200112.1.001



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM, DAN KABUPATEN PALI
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108 Muara Enim 31312
Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pamuaraenim@gmail.com

BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA TINGKAT PERTAMA TRIWULAN IV PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, Buku Induk Keuangan Perkara Tingkat Pertama ditutup dengan rincian sebagai berikut :

A. Buku Induk Keuangan Perkara :	
1. Penerimaan	= Rp 144.447.200,00,-
2. Pengeluaran	= Rp 83.465.700,00,-
3. Saldo Buku Induk Keuangan Perkara	= Rp 60.981.500,00,-
B. Keadaan Uang Riil sebagai berikut :	
1. Uang pada Brankas	= Rp 4.204.119,00,-
2. Saldo di Bank BNI Syari'ah	= Rp 56.777.381,00,-
3. Selisih	= Rp 19,00,-
Jumlah Seluruhnya	= Rp 60.981.500,00,-

Rincian Uang Tunai/ Kas :

1. Lembar Uang Kertas @ Rp 100.000 = 42 Lb	= Rp 4.200.000,00,-
2. Lembar Uang Kertas @ Rp 2.000 = 2 Lb	= Rp 4.000,00,-
Sub Jumlah	= Rp 4.204.000,00,-

1) Keping Uang Logam @ Rp 100 = 1 Kp	= Rp 100,00,-
	= Rp 100,00,-
2) Materai	NIHIL
3) Saldo Bank	= Rp 56.777.381,00,-
Jumlah Seluruhnya	= Rp 60.981.481,00,-
Selisih	= Rp 19,00,-
	= Rp 60.981.500,00,-

Catatan :

Terdapat Selisih karena kesulitan Pengadaan Uang pecahan.



Mengetahui
Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum

Yang Diperiksa

Drs. Suratman Hardi



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM, DAN KABUPATEN PALI
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108 Muara Enim 31312
Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pamuaraenim@ymail.com

BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU KONSINYASI TRIWULAN IV PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh,
BukuKonsinyasiditutupdengandrinciansebagaberikut :

A. BukuIndukKeuanganKonsinyasi :

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Penerimaan | = NIHIL |
| 2. Pengeluaran | = NIHIL |
| 3. SaldoBukuIndukEksekusi | = NIHIL |

B. KeadaanUangRiilsebagaberikut :

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. UangPadaBrankas | = NIHIL |
| 2. Saldo di Bank BNI Syari'ah | = NIHIL |
| 3. Selisih | = NIHIL |

JumlahSeluruhnya = NIHIL

Mengetahui

WakilKetuaPengadilan Agama MuaraEnim



Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum

Yang Diperiksa

Drs. SuratmanHardi



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM, DAN KABUPATEN PALI

**BERITA ACARA PENUTUPAN
BUKU INDUK KEUANGAN EKSEKUSI
TRIWULAN IV
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, BukuIndukKeuanganEksekusiditutupdengandrinciansebagaiberikut :

A. BukuIndukKeuanganPerkara :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Penerimaan | = NIHIL |
| 2. Pengeluaran | = NIHIL |
| 3. SaldoBukuIndukKeuanganEksekusi | = Rp 5.401.000 |

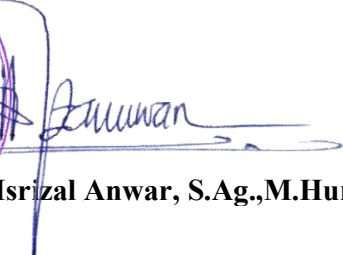
B. KeadaanUangRiilsebagaiberikut :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. UangPadaBrankas | = Rp 5.401.000 |
| 2. Saldo di Bank BNI Syari'ah | = NIHIL |
| 3. Selisih | = NIHIL |
| JumlahSeluruhnya | = Rp 5.401.000 |

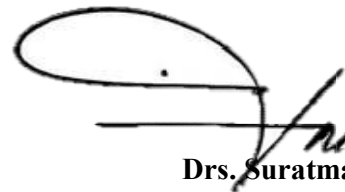
Mengetahui

WakilKetuaPengadilan Agama MuaraEnim




Isrizal Anwar, S.Ag.,M.Hum

Yang Diperiksa


Drs. SuratmanHardi

**BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
DESEMBER 2020**

			PENERIMAAN		PENGELUARAN													KET
NO URUT	TANGGAL TRANSAKSI	NO PERKARA	PANJAR		PANGGILAN	PENERJEMAH	SITA	PEMERIKSAAN SETEMPAT	SUMPAAH	PEMBERITAHUAN	PENGIRIMAN BIAYA	BIAYA PROSES	MATERAI	HAK-HAK KEPANITERAAN	PSP	LAIN-LAIN	JUMLAH PENGELUARAN	
			JENIS	JUMLAH														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Saldo Awal		120.914.200														
202	21/12/2020	854/Pdt.G/2020/PA.ME	Tk. Pertama		100.000													100.000
203	22/12/2020	797/Pdt.G/2020/PA.ME	Tk. Pertama		100.000													100.000
204	22/12/2020	818/Pdt.G/2020/PA.ME	Tk. Pertama												855.000		855.000	
205	22/12/2020	530/Pdt.P/2020/PA.ME	Tk. Pertama										6.000	10.000	930.000		946.000	
206	22/12/2020	535/Pdt.P/2020/PA.ME	Tk. Pertama										6.000	10.000	49.000		65.000	
207	22/12/2020	864/Pdt.G/2020/PA.ME	Tk. Pertama							150.000			6.000	10.000	170.000		336.000	
208	23/12/2020	784/Pdt.G/2020/PA.ME	Tk. Pertama	229.000	250.000												250.000	
209	28/12/2020	652/Pdt.G/2020/PA.ME	Tk. Pertama								150.000						150.000	
210	28/12/2020	707/Pdt.G/2020/PA.ME	Tk. Pertama														-	
	JUMLAH PENERIMAAN DESEMBER 2020			23.533.000	19.155.000	-	-	-	-	11.105.000	300.000	1.000.000	438.000	2.290.000	48.777.700	400.000	83.465.700	
	SALDO AWAL			120.914.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.981.500	
	TOTAL SALDO			144.447.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.447.200	

Perincian Sisa Kas Sebagai Berikut :

1	Lembar Uang Kertas @ Rp 100.000 = 42 Lb	= Rp 4.200.000,00,-
	Lembar Uang Kertas @ Rp 2.000 = 2 Lb	= Rp 4.000,00,-
	Sub Jumlah	= Rp 4.204.000,00,-
2	Keping Uang Logam @ Rp 100= 1 Kp	= Rp 100,00,-
	Sub Jumlah	= Rp 100,00,-
3	Materai	NIHIL
4	Saldo Bank	= Rp 56.777.381,00,-
	Jumlah Seluruhnya	= Rp 60.981.481,00,-
	Selisih	= Rp 19,00,-
		Rp 60.981.500,00,-

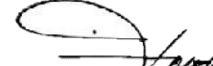
Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh,
Buku Induk Keuan Perkara Tingkat Pertama ditutup dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Sisa Menurut Buku Kas Rp 60.981.500,00,-
Jumlah Sisa Menurut Kas Rp 60.981.500,00,-

Mengetahui
Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

Istrizal Anwar, S.Ag., M.Hum
NIP. 19730106.199903.1.006

Muara Enim, 31 Desember 2020
Panitera


Drs. Suratman Hardi
NIP. 19661015.199603.1.002